

Evaluasi implementasi Pusat IGOS FITB

November 2024

Oleh: Dasapta Erwin Irawan, Ketua Pusat IGOS FITB, 082121424210,
dasaptaerwin@itb.ac.id

Anggota: Tedy Kusmawan (Kabag FITB), Nuri Rahayu Khumaeroh, dan Mohammad Fariz Hamzah

Abstrak:

Evaluasi implementasi Pusat IGOS FITB mengidentifikasi beberapa tantangan dalam operasional pusat aktivitas dosen non-kurikuler yang masih terikat pada mekanisme kerja terpusat di ITB. Sebagai PTN-bh, ITB harus mengikuti regulasi nasional namun masih memiliki celah fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan. Pengelola pusat perlu bersikap realistis dan mempertimbangkan batasan sistemik dalam konteks administratif ITB. Untuk efisiensi operasional, pekerjaan bernilai besar dan melibatkan banyak jasa pihak ketiga sebaiknya ditangani unit lain karena kompleksitas administrasi. Selain itu, kewenangan Ketua Pusat yang terbatas menyebabkan keterlambatan proses yang dapat diatasi dengan pendelegasian kewenangan dari Dekanat. Evaluasi ini juga merekomendasikan penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi antara Pusat IGOS dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Uraian:

1. IGOS adalah pusat aktivitas dosen non-kurikuler (tetapi masih dalam lingkup Tridarma Perguruan Tinggi—Perti) yang masih sangat bergantung kepada mekanisme kerja yang ada di ITB. Semua proses masih terpusat, sebagai konsekuensi langsung dari hasil audit eksternal terhadap sistem manajemen ITB. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum (PTN-bh), ITB tidak memiliki fleksibilitas untuk mengubah regulasi yang telah ditetapkan di tingkat nasional,

sehingga harus mengikuti prosedur standar yang berlaku. Peluang perbaikan: Meskipun demikian, masih terdapat beberapa celah fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan dalam kewenangan ITB sebagai PTN-bh. Syaratnya pimpinan dan tim perlu mengevaluasi secara teknis, aspek apa saja yang tidak diatur oleh regulasi nasional.

2. Oleh karena itu, dalam mengelola pekerjaan-pekerjaannya, pengelola pusat perlu bersikap lebih realistis dan memperhitungkan dominasi proses yang terpusat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional pusat dapat berjalan dengan lancar meskipun terdapat batasan-batasan sistemik yang tidak dapat dihindari dalam konteks administratif ITB. Peluang perbaikan: Pengelola pusat fakultas dapat menyaring (screening) kegiatan dan merekomendasikan unit-unit yang lebih sesuai untuk menanganinya, misal: Perusahaan-perusahaan milik ITB di bawah BPUDL.
3. Pekerjaan bernilai besar (lebih dari Rp. 500 juta) dan pekerjaan yang melibatkan banyak jasa pihak ketiga sebaiknya tidak ditangani oleh pusat fakultas. Kompleksitas administrasi dan tanggung jawab keuangan yang timbul dapat menjadi beban signifikan bagi pengelolaan di tingkat fakultas. Keterlibatan Direktorat Logistik akan sangat intensif ketika ada jasa pihak ketiga yang nilainya melebihi Rp. 200 juta. Peluang perbaikan: Pengelola pusat fakultas diberi kewenangan untuk memilah kegiatan mana yang dapat ditangani oleh pusat fakultas dan mana yang dapat dipindahkan ke unit kerja lainnya (lihat butir ke-2).
4. Ketua Pusat memiliki kewenangan yang sangat terbatas, hanya sebatas memberikan persetujuan atau paraf pada dokumen pusat. Seluruh proses dari fakultas ke unit kerja rektorat hanya dapat berjalan jika Dekanat menandatangani. Sering terjadi keterlambatan akibat perbedaan persepsi antara Dekanat dengan tim kerja sama (yang sebenarnya wajar dan dapat dipahami dalam konteks koordinasi antar unit). Namun, keterlambatan yang tidak perlu ini dapat dihindari jika Ketua Pusat diberi sedikit tambahan kewenangan untuk mempercepat beberapa proses administratif yang tidak memerlukan pertimbangan strategis tingkat fakultas. Peluang perbaikan: Perlu ada

pendelegasian kewenangan Dekanat kepada kepala pusat (tentunya dengan beberapa batasan) agar keputusan dapat dieksekusi dengan lebih cepat.

5. Perlu diperkuat mekanisme komunikasi dan koordinasi antara Pusat IGOS dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Sementara ini, alur komunikasi harus melalui jalur Dekanat. Koordinasi yang lebih baik dengan Fakultas, Direktorat terkait, dan mitra eksternal akan meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan yang dapat diberikan. Peluang perbaikan: Mengembangkan prosedur standar komunikasi dan jadwal pertemuan rutin dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi aliran informasi yang lebih lancar.